

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	2
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Pos Kota

Anies Disebut Langgar UU

JAKARTA (Poskota) - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengubah nama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) menjadi Rumah Sehat untuk Jakarta. Perubahan nama disertai penyeragaman seluruh logo rumah sakit umum se-Jakarta.

Pencanangan perubahan nama RSUD menjadi Rumah Sehat untuk Jakarta dilakukan di RSUD Cengkareng. Jakarta Barat, pada Rabu (3/8). Melalui perubahan penyebutan ini, Anies berharap agar rumah sakit tidak lagi sebagai tempat orang sakit.

"Nah di sisi lain pada pandemi kemarin kita menyaksikan pentingnya menjaga kesehatan. Karena itu, Rumah Sehat ini perannya ditambah, yakni aspek promotif dan preventif," ujar Anies saat peluncuran Penjenamaan Rumah Sehat untuk Jakarta di RSUD Cengkareng, Rabu (3/8).

Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, menyebut penjenamaan atau perubahan penyebutan nama Rumah Sakit menjadi Rumah Sehat tersebut telah melanggar Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 yaitu UU tentang Rumah Sakit.

"Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat," ujar Hari, Kamis (4/8/2022).

Hari pun menyebut Gubernur Anies secara langsung telah melawan Undang-Undang No 44 Tahun 2009. Oleh karena itu, perubahan nama Rumah Sakit menjadi Rumah Sehat harus didiskusikan terlebih dahulu oleh DPRD DKI Jakarta. "Tentunya dalam perubahan nama yang diatur dalam UU membutuhkan keputusan DPRD DKI Jakarta", ucapnya.

Ketua DPRD Minta Anies Stop Buat kebijakan Ngawur

Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, angkat bi-

cara mengenai perubahan nama Rumah Sakit menjadi Rumah Sehat. Pras, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa Jakarta sebagai Ibu Kota seharusnya memunculkan program pembanguan atau pelayanan yang berdampak langsung kepada masyarakat.

"Yang terasa langsung gitu kesuksesannya di tengah masyarakat. Bukan cuma ganti ganti nama. Kemarin nama jalan, sekarang rumah sakit. Stop deh bikin kebijakan ngawur," katanya saat dihubungi Poskota, Kamis (4/8).

Politikus PDIP ini menyebut, Jakarta masih memiliki segudang masalah yang perlu penanganan segera. Seperti presentase angka kemiskinan yang terus merangkak naik. Kemudian permasalahan kampung kumuh di tengah kota yang juga belum terselesaikan.

"Ini Jakarta lho. Lihat tuh Tanah Tinggi, terus Johar. Mereka itu perlu sentuhan pemerintah. Butuh solusi dengan program-program yang baik, bukan ganti ganti nama begitu. Itu enggak dibutuhkan masyarakat," cetusnya.

Legislator Kebon Sirih ini juga mengaku tergelitik dengan penamaan 'Rumah Sehat'. Menurutnya, sudah sejak dulu semua orang mengetahui rumah sakit adalah lokasi untuk mengobati penyakit. Lagi pula penamaan rumah sakit sudah tertera jelas dalam Undang-undang.

"Jadi memang aturannya di Pasal 1 jelas namanya rumah sakit. Dari dulu kalau kita sakit ke mana sih larinya, ya ke rumah sakit. Memang namanya rumah sakit ya untuk mengobati penyakit. Logikanya kan begitu. Kalau sudah sehat ya kerja, beraktivitas kembali," pungkasnya.

(Aldi/mif)